

Perkembangan Partai Indonesia Raya (Parindra) di Kalimantan Barat 1937–1942

(The Growth of the Great Indonesia Party (Parindra) in West Kalimantan 1937–1942)

Mohammad Rikaz Prabowo 

Program Studi Pendidikan Sejarah, Universitas Tanjungpura
Jalan Profesor Dokter H. Hadari Nawawi, Pontianak Tenggara, Pontianak 78115
Tel.: +62(625)61740144
Surel: m.rikaz.prabowo@fkip.untan.ac.id

Received: 25 Juni 2024

Revised: 20 Desember 2024

Published: 31 Desember 2024

Abstrak

Partai Indonesia Raya (Parindra) ialah partai besar di era pergerakan kebangsaan, didirikan oleh dr. Soetomo dengan melakukan fusi antara Boedi Oetomo (BO) dengan Persatuan Bangsa Indonesia (PBI) pada 1936. Parindra memiliki cabang yang cukup luas, termasuk di Kalimantan Barat. Penelitian ini menggunakan metode sejarah melalui tahapan heuristik, verifikasi, interpretasi, dan historiografi. Berdasarkan hasil analisis diperoleh beberapa simpulan terkait perkembangan Parindra di Kalimantan Barat. Pertama, Parindra hadir pada 1936 di Pontianak yang didirikan oleh R. Koempoel, A. N. Hadjarati, Mustamir, dan A. Harahap yang semuanya adalah aktivis Parindra. Pada 22 Juli 1938 cabang Pontianak diresmikan, menyusul Singkawang pada 1 Desember 1938. Kedua, didirikan juga sayap organisasi pemuda Parindra, yakni Surya Wirawan. Sepanjang 1939–1941 berdiri cabang di Mempawah, Sambas, Ngabang, Tayan, Sintang, Sukadana, dan Nanga Bunut. Ketiga, Parindra menggariskan perjuangannya melalui politik kooperatif dan terbuka dalam menghadapi kolonialisme Belanda. Perjuangan Parindra dalam bidang ekonomi ialah dengan membuka koperasi-koperasi, sedangkan dalam bidang sosial dengan mengumpulkan zakat dan mendirikan sekolah baca tulis. Adapun dalam bidang politik Parindra memilih untuk bekerja sama dengan organisasi Persatuan Anak Borneo (PAB), dan mengadakan rapat-rapat umum dalam mendukung tuntutan “Indonesia Berparlemen” oleh GAPI (Gabungan Politik Indonesia).

Kata kunci: Parindra, Persatuan Anak Borneo (PAB), Surya Wirawan (SW)

Abstract

The Great Indonesia Party (Parindra) is a major party in the era of the national movement, founded by dr. Soetomo by carrying out a fusion between Boedi Oetomo (BO) and the Indonesian National Association (PBI) in 1936. Parindra has quite extensive branches, including in West Kalimantan. This research uses historical methods through heuristic, verification, interpretation, and historiography. Based on the results of the analysis, several conclusions were obtained regarding the development of Parindra in West Kalimantan. First, Parindra was present in 1936 in Pontianak, which was founded by R. Koempoel, A. N. Hadjarati, Mustamir, and A. Harahap, all of whom were Parindra activists. On July 22, 1938, the Pontianak branch was officially established, followed by Singkawang on December 1, 1938. Second, youth organization wings of Parindra were also established, namely Surya Wirawan. Throughout 1939–1941, branches were established in Mempawah, Sambas, Ngabang, Tayan, Sintang, Sukadana, and Nanga Bunut. Third, Parindra outlined its struggle through cooperative and open politics in facing Dutch colonialism. Parindra's struggle in the economic field was by opening cooperatives, while in the social field by collecting zakat and establishing literacy schools. In the political field, Parindra chose to work together with the Borneo Children's Union (PAB), and held general meetings to support the demand for “Indonesia to be a parliament” by GAPI (Indonesian Political Union).



verification, interpretation, and historiography stages. Based on the analysis results, several conclusions were obtained regarding the development of Parindra in West Kalimantan. First, Parindra was present in 1936 in Pontianak, founded by R. Koempoel, A.N. Hadjarati, Mustamir, and A. Harahap, all Parindra activists. On 22 July 1938, the Pontianak branch was inaugurated, followed by Singkawang on 1 December 1938. Second, a wing of the Parindra youth organization, namely Surya Wirawan, was also established. Throughout 1939-1941, branches were established in Mempawah, Sambas, Ngabang, Tayan, Sintang, Sukadana and Nanga Bunut. Third, Parindra outlined his struggle through cooperative and open politics in facing Dutch colonialism. Parindra's struggle in the economic sector is by opening an economic union (*koperasi*), while in the social sector by collecting *zakat* and establishing reading and writing schools. As for the political field, Parindra chose to collaborate with the Persatuan Anak Borneo (PAB) organization, and held public meetings in support of GAPI's demand for "Indonesia with a Parliament."

Keywords: Parindra, Persatuan Anak Borneo (PAB), Surya Wirawan (SW)

PENDAHULUAN

Riwayat perjuangan bangsa Indonesia di era pergerakan nasional pernah diwarnai dengan haluan politik yang bersedia bekerja sama dengan pemerintah kolonial atau *kooperasi*. Haluan ini dipilih sebagai reaksi atas sejumlah penangkapan dan pembuangan para aktivis pergerakan antara 1927–1934 yang mengambil sikap *nonkooperasi*. Hal ini terutama sekali terjadi pascapemberontakan PKI 1296/1927 dan menguatnya kelompok nasionalis yang dianggap setelah berdirinya PNI (1929). Pergantian haluan menjadi *kooperasi* disiasati agar dapat melanjutkan perjuangan sebagai sebuah strategi (Perdana & Pratama 2022, 81). Beberapa tokoh penting yang dikenal sebagai kelompok *kooperatif* ialah dr. Soetomo yang pada sekitar November 1930 mendirikan Persatuan Bangsa Indonesia (PBI) di Surabaya, metamorfosis dari Kelompok Studi Indonesia (*Indonesische Studieclub*). PBI terinspirasi sikap PNI dengan agitasi politiknya, tetapi lebih berhati-hati agar tidak mendapatkan tekanan dari pemerintah kolonial. Sikap politik PBI cenderung *kooperatif* dengan menyesuaikan keadaan politik yang sedang terjadi (*kooperatif-insidentil*) (Kasenda et al. 2013, 85).

Oleh karena sikap kebangsaan, *kooperatif*, dan terbuka untuk semua lapisan, perkembangan PBI cukup pesat dengan terus tumbuhnya anggota dan cabang-cabang. Gerakan PBI yang lebih diarahkan untuk memajukan kegiatan sosial ekonomi rakyat ditujukan untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat agar kemudian timbul kesadaran nasional. PBI memiliki divisi *studieclub* untuk melatih dialektika, berdiskusi, melakukan kajian bersama, dan sejenisnya yang salah satu fungsinya meluaskan cakupan tentang kesadaran nasional (Samidi 2023, 213). Oleh sebab itu, untuk mempercepat proses terwujudnya kesejahteraan rakyat, pada 24–25 Desember 1935 dr. Soetomo mengadakan kongres di Surakarta untuk menyatukan Boedi Oetomo (BO) yang pernah ia dirikan pada 1908 dengan PBI. Penyatuan itu dilanjutkan dengan fusi untuk kemudian para pengurusnya bersama-sama mendirikan Partai Indonesia Raya (Parindra) dengan tujuan mewujudkan Indonesia mulia dan sempurna (Tim Muskitnas 2011, 37).

Fusi tersebut sebenarnya juga diikuti oleh beberapa organisasi bercorak kedaerahan seperti Serikat Selebes, Serikat Sumatera, Serikat Ambon, Perkumpulan Kaum Betawi, dan Tirtayasa (Santosa & Supriatna 2008, 101). Dalam waktu singkat Parindra menjelma partai besar, belum genap setahun berdiri pada 1936 telah memiliki 3425 anggota yang tersebar di 37 cabang hingga di luar Pulau Jawa (Perdana & Pratama 2022, 65–66). Dengan demikian, tidak mengherankan jika akhirnya Parindra dianggap sebagai kelompok utama politik *kooperatif* dan

partai politik dengan pertumbuhan besar yang cepat dan didukung sejumlah aktivis yang duduk di *Volksraad* seperti Muhammad Husni Thamrin.

Parindra banyak berdiri hingga di luar Pulau Jawa dengan melanjutkan kepengurusan organisasi-organisasi yang berfusi dengan nama dan bentuk baru. Kepengurusan Parindra secara umum dikuasai oleh golongan priyayi muda intelek (pemuda terdidik) (Kasenda et al. 2013, 88). Di Kalimantan embrio Parindra cabang Banjarmasin (Borneo Timur-Selatan) eksis sejak 1930/1931 karena telah terdapat kepengurusan PBI (Wajidi 2015, 19). Parindra pada akhirnya juga membangun cabangnya di Pontianak (Borneo Barat) pada 1936 yang digagas oleh sejumlah elite terdidik seperti Raden Koempoel (kepala kantor pos), Hadjarati (guru HIS), Mustamir (konsul pertanian), dan Abdulaziz Harahap (kepala pelabuhan) (Soedarto et al. 1978, 54). Meskipun Parindra di wilayah ini dibangun dari nol, sifatnya yang nasionalis dan terbuka membuat partai ini mendapatkan simpati besar sehingga mampu meluaskan kepengurusannya, bahkan di kalangan aristokrat kesultanan. Oleh sebab itu, dalam tulisan ini dibahas lebih lanjut bagaimana proses perintisan Parindra di Kalimantan Barat, perluasan cabang dan konsolidasi organisasi, serta bentuk-bentuk perjuangan dan gerakannya.

Keberhasilan Parindra dalam perjuangan politik kooperasi di era pergerakan kebangsaan menarik minat beberapa peneliti sejarah. Misal, penelitian berjudul “Golongan Tua Menggagas Pergerakan Nasional: Pemikiran R.M.T Koesoemo Oetoyo di Bidang Politik Tahun 1908–1942” oleh Dikawati & Sudrajat (2017). Hasil penelitian menunjukkan peran sejumlah golongan tua, terutama R. M. T Koesoemo Oetoyo yang pada 1935 menjadi Ketua Boedi Oetomo yang berperan dalam proses fusi bersama PBI sehingga termasuk dalam tokoh awal pendirian Parindra. Koesoemo Oetoyo termasuk tokoh konseptor jalan perjuangan Parindra agar lebih mengedepankan cara-cara diplomasi dibandingkan cara radikal. Oleh sebab itu, ia akhirnya bergabung di dalam *Volksraad* bersama fraksi nasional (Dikawati & Sudrajat 2017, 38).

Selain itu, terdapat pula penelitian dalam batasan spasial tingkat lokal yang cukup sulit ditemukan, yang membahas sejarah keberadaan Parindra di salah satu cabang. Dalam penelitian Wajidi (2015) berjudul “Eksistensi Partai Indonesia Raya (Parindra) di Kalimantan Selatan (1935–1942)” cukup utuh dibahas perkembangan partai ini sejak pertama berdiri hingga dibubarkan pada masa Jepang di wilayah Kalimantan Selatan. Hasil penelitian menunjukkan Parindra di wilayah tersebut merupakan kelanjutan organisasi PBI yang telah ada sebelum 1935, dengan melaksanakan prinsip kooperasi berhasil menempatkan wakilnya di sejumlah dewan daerah (*raad*). Ditambah pula berhasil mendirikan sejumlah organisasi afiliasi seperti Rukun Tani, Koperasi, Rukun Pelayaran Indonesia, hingga mendirikan Sekolah Parindra (Wajidi 2015, 30).

Berdasarkan uraian tersebut di atas, para peneliti secara umum membahas proses fusi Boedi Oetomo dengan PBI hingga terbentuklah Parindra. Kedua penelitian tersebut menggambarkan bagaimana proses fusinya di Jawa dan Kalimantan Selatan. Selain itu, juga diwarnai dengan pemaparan perjuangan politik Parindra secara kooperasi melalui wakil-wakilnya di dewan-dewan (*raad-raad*) seperti di *Volksraad* dan *Banjar Raad*. Hal tersebut berbeda dengan penelitian ini yang membahas Parindra di Keresidenan Kalimantan Barat, yang berdirinya tidak melalui proses penyesuaian akibat fusi PBI dengan Boedi Oetomo. Parindra di wilayah ini benar-benar didirikan oleh sejumlah elite bumiputera terdidik, yang kemudian dibesarkan oleh berbagai kalangan dan latar belakang politik seperti aktivis eks-Digulis, Islamis, nasionalis, aristokrat kesultanan, dan nonpartisan (Soedarto et al. 1978, 54–57).

Dengan demikian, melalui penelitian ini dapat dihasilkan sebuah telaah baru serta berpeluang mengisi beberapa celah kekosongan sejarah terkait Parindra. Penelitian ini dapat memberikan gambaran pendirian Parindra di Kalimantan Barat yang tanpa proses penyesuaian akibat fusi seperti di Jawa, dan perkembangan partai ini di tingkat lokal khususnya di Kalimantan Barat. Penelitian ini penting dilakukan karena diharapkan menyumbang perbendaharaan historiografi sejarah Indonesia era pergerakan nasional di Kalimantan yang dirasa masih kurang. Selain itu, penelitian ini juga mampu menyajikan contoh dinamika politik kebangsaan yang terjadi di luar Pulau Jawa.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode sejarah untuk mengungkapkan perkembangan Parindra di Kalimantan Barat 1937–1942. Metode ini dilalui dengan beberapa tahap setelah penentuan topik, yakni pengumpulan sumber-sumber (heuristik), kritik sumber (verifikasi), penafsiran sumber (interpretasi), dan penulisan sejarah (historiografi).

Sumber primer yang digunakan ialah sumber-sumber tertulis berupa surat kabar sezaman, seperti surat kabar resmi yang diterbitkan oleh *Hoofdbestuur* (HB) Parindra yang terbit setiap bulan yakni majalah *Soeara Parindra*. Terdapat pula surat kabar lokal yang terbit di Pontianak dan sering memuat berita dan aktivitas Parindra di Kalimantan Barat yakni *Borneo-Barat* (1938–1941) dan *Borneo Barat Shinbun* (1942). Sementara itu, sumber sekunder berupa hasil kajian atau penelitian, baik berupa buku, jurnal, maupun monograf terkait sejarah gerakan pergerakan kebangsaan nasional dan Kalimantan Barat.

Langkah selanjutnya ialah melakukan verifikasi sumber, untuk memeriksa keaslian sumber (kritik eksternal) dan kredibilitas sumber (kritik internal). Penelitian ini mengandalkan sumber tulisan (dokumen), sehingga untuk menjaga keotentikan surat kabar-surat kabar lama yang digunakan, peneliti memperolehnya dari layanan Perpustakaan Nasional RI. Lebih lanjut, untuk menjaga kredibilitas sumber dilakukan kritik internal dengan melakukan perbandingan dengan sumber sejarah yang lain (Kanumuyoso 2020, 39). Salah satu buku perbandingan yang peneliti gunakan untuk memverifikasi kredibilitas isi surat kabar yang digunakan di antaranya *Naskah Sejarah Perjuangan Rakyat Kalimantan Barat 1908–1950* karya Soedarto (1989). Pada buku tersebut dipaparkan secara kronologis perlawanan terhadap kolonialisme Belanda di wilayah ini pada 1930-an hingga menjelang masuknya Jepang (1942) yang sesuai dengan corak pergerakan kebangsaan era itu, yakni melalui perjuangan organisasi atau parlementer.

Proses pemaknaan mensyaratkan wawasan yang cukup tentang topik penelitian yang sedang digarap, sehingga diperlukan proses interpretasi atau penafsiran. Teknik interpretasi yang digunakan ialah interpretasi pluralistik, yang mengamati perkembangan-perkembangan di bidang lain seperti sosial, ekonomi, budaya, dan politik yang menunjukkan adanya pola-pola peradaban yang multikompleks (Abbas 2014, 38). Interpretasi ialah telaah untuk dapat membayangkan seperti apa situasi ketika peristiwa itu berlangsung, kemudian direkonstruksikan kepada khalayak saat ini. Interpretasi dapat dilakukan dengan menggunakan sumber-sumber yang telah melewati verifikasi sehingga teruji kredibilitas dan keotentikannya (Padiatra 2020, 112). Selain surat kabar sezaman, penelitian ini juga memanfaatkan beberapa buku yang peneliti nilai cukup penting dalam membantu tahapan ini, di antaranya *Sejarah Perjuangan Kalimantan Barat* (1982) karya Machrus Effendy yang pernah aktif di Parindra cabang Sambas dan cabang Pontianak, dan *Sebelas Perintis Kemerdekaan Indonesia dari Kalimantan Barat* (1972) karya R. Mahmud Susilo Suwignjo yang pernah aktif di kepengurusan cabang Ngabang.

Penggunaan metode sejarah menurut Kanumuyoso (2020, 45) menyebabkan adanya pendekatan antara sejarah dengan bidang ilmu-ilmu sosial lainnya. Pengkajian sejarah yang menggunakan metode ini akan lebih mampu melakukan eksplanasi dibandingkan yang membatasi diri hanya pada pengungkapan bagaimana sesuatu terjadi atau menguraikan kejadiannya sebagai narasi (cerita). Untuk itu, penelitian ini menggunakan pendekatan sejarah politik yang menurut Abbas (2014, 36), sejarah konvensional sebenarnya identik dengan politik, yaitu jalannya sejarah ditentukan adanya kejadian-kejadian politik, kegiatan diplomasi, dan tindakan tokoh-tokoh politik.

Dengan begitu, pendekatan sejarah politik dianggap memungkinkan untuk menganalisis perkembangan Parindra di Kalimantan Barat yang secara nyata merupakan partai politik untuk mencapai kemerdekaan Indonesia. Sejarah politik tingkat lokal adalah kepanjangan peristiwa nasional (Kuntowijoyo 2003, 185). Oleh karena itu, apabila berkaca pada eksistensi Parindra di wilayah ini, tepatlah bahwa keberadaannya memang bagian dari suasana pergerakan kebangsaan secara nasional di era itu.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perintisan Cabang Parindra di Kalimantan Barat

Kondisi pergerakan kebangsaan melalui perjuangan politik di wilayah Kalimantan Barat sebelum berdirinya Parindra (1935) dapat dikatakan mengalami kemunduran. Hal ini dikarenakan sejumlah tindakan-tindakan represif dan preventif yang dilakukan pemerintah kolonial pascapemberontakan PKI 1926/1927. Selain menangkap aktivis Sarekat Rakyat Pontianak dan membuang 11 tokoh utamanya ke Boven Digoel pada 1 April 1927 (De Keizer 1927), aparat kolonial juga melakukan pengawasan ketat terhadap seluruh gerak-gerik yang dapat diprakarsai oleh bumiputera terpelajar untuk (berpotensi) melakukan perlawanan atau sekadar tulisan-tulisan kritik, baik itu surat kabar, mimbar-mimbar umum, sekolah partikelir, dan organisasi-organisasi yang ada.

Hal ini menyebabkan aktivis pergerakan yang luput dari penangkapan menahan diri dan mengendurkan aktivitas kritisnya. Mereka mencari jalan aman agar tidak ditangkap dan tetap dapat melanjutkan perjuangan dengan cara baru yang tidak mengundang kecurigaan aparat. Hal ini terlihat pada surat kabar-surat kabar yang terbit pasca-1926/1927 yang tidak lagi secara gamblang memuat kritik-kritik kepada pemerintah kolonial, tetapi disamarkan dalam tulisan analisis tentang situasi sosial dan ekonomi di wilayah ini, umumnya persoalan irigasi, migrasi, dan edukasi (Listiana et al. 2014, 101–102). Di lain pihak, hanya organisasi sosial yang dapat bertahan dan menjalankan kegiatannya dengan mendirikan sekolah, panti, ataupun sarana kesehatan. Oleh karena itu, di wilayah ini praktis hanya menyisakan Muhammadiyah, Tarbiyatul Islam (Sambas), organisasi-organisasi masyarakat Tionghoa, dan usaha-usaha Misi Katolik (Soedarto et al. 1978, 46–49).

Seperti yang telah diungkapkan, keberadaan Parindra di Kalimantan Barat bukan bermula dari hasil penyesuaian pascafusi antara PBI dengan BO seperti yang terjadi pada 1935. Kehadirannya diperkenalkan oleh tokoh yang memiliki kedudukan penting di Pontianak sekitar 1936, yakni R. Koempoel (kepala kantor pos; ketua), A. N. Hadjarati (guru HIS negeri), Mustamir (ajun konsul pertanian), dan A. Harahap (Kantor Pelabuhan) (Soedarto et al. 1978, 54). Historiografi yang ada tidak menjelaskan hubungan keempat tokoh ini dengan Parindra. Namun, dilihat dari status pekerjaan mereka sebagai pegawai negeri, kuat dugaan bahwa keempatnya telah bersinggungan lebih dahulu dengan Parindra sebelum akhirnya dipindahkan dan ditempatkan di Pontianak. Dugaan ini diperkuat dengan adanya pemberitaan di majalah

Soeara Parindra edisi Juni 1936 yang mengabarkan seorang pengurus Parindra cabang Cilacap telah berpindah domisili ke Pontianak (Wongsokoesomo 1936b, 22).

Meskipun telah diperkenalkan pada 1936, tidak serta merta menjadikan Parindra di Pontianak diakui statusnya sebagai cabang. Aturan partai mengharuskan setiap cabang memiliki kepengurusan dengan jumlah anggota sekurang-kurangnya 20 orang (Wongsokoesomo 1936a, 5). Raden Koempoel dan rekan-rekan Parindra di Pontianak tampaknya juga memilih untuk berhati-hati dalam mengembangkan organisasinya atau memperbanyak anggota hingga dapat berstatus dari ranting (*kring*) menjadi cabang. Hal ini dapat dipahami karena kondisi saat itu pemerintah kolonial mengeluarkan aturan yang ketat dengan berbagai larangan-larangan terkait gerakan-gerakan politik (Nurchayani 2019, 65). Hal ini ditambah pengalaman masa lalu ketika Pontianak diidentifikasi sebagai daerah merah yang banyak terdapat aktivis kiri Sarekat Rakyat (SR) yang kemudian dibuang ke Boven Digul pada 1927. Oleh sebab itu, tidak mengherankan bahwa hingga menjelang pertengahan tahun 1937 belum terdapat satu pun cabang resmi Parindra di Kalimantan Barat yang didirikan (Wongsokoesomo 1937b, 20).

Pendirian Parindra cabang Pontianak akhirnya baru dapat direalisasikan pada 22 Juli 1938 melalui sebuah rapat yang diikuti oleh 36 anggota termasuk ketua ranting Raden Koempoel di rumah Saudara Dollah yang terletak di *Palmenlaan*. A. N. Hadjarati kemudian terpilih menjadi Ketua Parindra cabang Pontianak, dibantu beberapa nama lain sebagai pengurus seperti Raden Koempoel (wakil ketua), A. Harahap, R. Soehardjo, Nyonya Raden Koempoel, A. R. Harahap, R. Soewarno, Abd. Hamid Nasoetion, Mohammad Saleh, dan Goesti Achmad. Dalam pidatonya, A. N. Hadjarati menekankan bahwa seluruh anggota juga diminta untuk bekerja dalam memajukan Parindra, sebab kewajiban itu bukan hanya terletak di tangan pengurus, tetapi juga seluruh anggota (Paath 1938, 3). Cabang Pontianak sendiri diperkuat oleh banyak anggota dari kalangan elite bumiputera terpelajar, salah satunya dr. Rubini (Paath 1938c, 2).

Sebagai langkah pertama agar aktivitas Parindra cabang Pontianak tidak mengundang reaksi dan sebagai bentuk strategi kooperasi partai, pengurus melakukan audiensi kepada kepala pemerintah lokal. Pada pertengahan Agustus 1938 A. N. Hadjarati bersama beberapa pengurus menemui Mr. Gerritsen yang menjabat *Hoofd Plaatselijk Bestuur van Pontianak*, dan pemerintah *Onderafdeeling* Pontianak Adspiran Kontrolir Tuan Hazevoet (Paath 1938b, 3). Perkenalan diri atau audiensi itu mendapat respons baik oleh pejabat setempat. Hal ini secara simbolis telah menjadikan Parindra mendapatkan restu pemerintah kolonial, dan akan lebih leluasa dalam menjalankan aktivitas partai sepanjang tidak bertentangan dengan perundang-perundangan.

Selain di Pontianak, Parindra juga dirintis keberadaannya di Singkawang yang menjadi kota terbesar kedua di wilayah ini. Kehadiran Parindra di kota ini bermula sekitar 1936 berkat adanya beberapa tokoh yang terdaftar dalam keanggotaan Parindra pusat di Surabaya. Memasuki 1938 perkembangan Parindra di Singkawang terlihat cukup positif dengan telah memiliki kurang lebih 25 anggota sehingga dibentuklah ranting (*kring*) sebagai kandidat cabang. Tren positif ini terus berlanjut hingga November 1938, ranting Parindra Singkawang telah memiliki 42 anggota yang terdiri atas berbagai kalangan dan status pekerjaan. Atas keberhasilan itu, Pengurus Besar Parindra di Surabaya kemudian menetapkan Parindra di Singkawang naik status dan diakui sebagai cabang per 1 Desember 1938 (Paath 1938c, 3).

Meskipun begitu, kepengurusan Parindra cabang Singkawang baru terbentuk pada 23 Desember 1938 melalui sebuah rapat internal di rumah Saudara A. M. Arief. Terpilih sebagai ketua dan wakil ketua (ketua muda) yakni M. Siswojoewono dan R. Joesoef, dibantu penulis

Asnie dan S. Sastroloekito, Moh. Daoed sebagai bendahara, serta beberapa nama lain yang juga masuk sebagai pengurus seperti A. M. Arief, Abdoelrani, Zaini, St. Soeleiman, Rahimin, dan Aboebakar. Pembentukan pengurus Parindra cabang Singkawang berlangsung dengan meriah karena juga mengundang sejumlah pengurus Parindra Pontianak seperti Raden Koempoel dan A. N. Hadjarati dan juga menyertakan pemuda Parindra yang tergabung dalam pandu Surya Wirawan. Kedua senior dan pengurus Parindra cabang Pontianak itu juga didapuk untuk memberikan kursus kepartaian kepada pengurus dan anggota cabang Singkawang. Kursus diadakan selama tiga hari pada 24–26 Desember 1938, dengan materi di antaranya sejarah perjuangan bangsa, asas partai, dan tujuan partai (Paath 1938d, 3).

Usaha perintisan ranting-ranting Parindra di Kalimantan Barat sebenarnya tidak hanya terjadi di Pontianak dan Singkawang yang berhasil diakui sebagai cabang pada 1938. Di sejumlah tempat lain di keresidenan ini juga terdapat ranting-ranting Parindra, seperti di Ngabang pimpinan R. Mahmud Susilo Suwignjo, Sambas pimpinan Machrus Effendi, Pemangkat pimpinan Uray Bawadi, Sintang pimpinan Gusti Ismail, Mempawah pimpinan Gusti Ismail, dan Tayan pimpinan Gusti Mahmud (Aju 2017, 30).

Pesatnya pertumbuhan Parindra hingga ke luar Jawa selain karena proses fusi berbagai organisasi politik dan kedaerahan sebagai simbol persatuan, juga karena keanggotaan partai ini yang terbuka untuk semua latar belakang. Parindra juga tidak menunjukkan sikap melawan terhadap pemerintah kolonial, bersedia bekerja sama, dan turut mendidik kesadaran berpolitik rakyat (Achmad et al. 1981, 58–59). Oleh sebab itu, tidak mengherankan bahwa Parindra mendapat sambutan baik dari tokoh-tokoh di Kalimantan Barat karena bertujuan memperkokoh persatuan bangsa dan memajukan perikehidupan rakyat (Nurchayani 2019, 67).

Pengembangan Organisasi Parindra di Kalimantan Barat

Parindra adalah partai besar yang jaringannya cukup luas, dengan ribuan anggota yang terdiri atas berbagai kalangan. Umumnya orang-orang yang bergabung di partai ini ialah kaum bumiputera terdidik seperti masyarakat kelas menengah, kelas tinggi, dan para cendekiawan (Perdana & Pratama 2022, 64). Tidak jarang pula dijumpai bahwa orang-orang yang bergabung ke Parindra adalah aktivis-aktivis politik, termasuk yang berasal dari partai-partai yang telah dibubarkan seperti Indische Partij (Insulinde), PKI, dan PNI. Sama halnya dengan tokoh-tokoh Sarekat Rakyat yang diinternir ke Boven Digul pada 1927 yang memilih bergabung ke Parindra saat kembali ke Pontianak seperti Gusti Sulung Lelanang dan Haji Rais (Listiana 2019, 110).

Dengan memiliki banyak anggota, Parindra dapat mendayagunakannya untuk mengembangkan organisasi demi tercapainya tujuan partai. Oleh sebab itu, Parindra membina sejumlah organisasi sayap, dan yang paling menonjol ialah Surya Wirawan (SW) yang cenderung lebih dahulu didirikan dan dibina oleh cabang-cabang partai. Organisasi ini didirikan untuk menampung minat pemuda-pemudi yang tertarik dengan Parindra dan kemudian diarahkan dalam sebuah gerakan kependuan. Dengan berlandaskan kebangsaan dan nasionalisme, Surya Wirawan mampu menyaingi organisasi kependuan lainnya seperti Hizbul Wathan milik Muhammadiyah ataupun *Padwinders* lainnya yang dibina sekolah negeri (Soedarto 1989, 100).

Surya Wirawan cabang Pontianak dikukuhkan pada Sabtu petang 10 Desember 1938 di sebuah lapangan di Jalan Landraad. Pengukuhan dihadiri oleh pengurus-anggota partai dan undangan, termasuk perwakilan pemerintah kolonial dan kepolisian. Dilantik sebagai ketua Surya Wirawan Pontianak yakni Abdul Rahim Harahap, yang mengucapkan sumpah akan mematuhi peraturan organisasi, menjunjung tinggi perintah partai, dan mengabdikan kepada bangsa dan tanah air. Hal

yang menarik, di pengukuhan itu turut dinyanyikan pula lagu Indonesia Raya yang diikuti oleh semua hadirin (berdiri) kecuali wakil pemerintah kolonial. Konon, hal ini menjadi yang pertama kalinya di Kalimantan Barat lagu Indonesia Raya dinyanyikan dimuka umum (Paath 1938c, 3).



Gambar 1: Konferensi Parindra dan Surya Wirawan di Pontianak 1939, dimuat dalam *Majalah Penjedar* No. 21 Tahun II, 21 Mei 1939 (Suryadi 2016).

Tidak berselang lama Surya Wirawan juga didirikan di cabang Singkawang pada 12 Januari 1939 dengan modal awal pendaftar sebanyak 50 pemuda. Dalam rapat yang dihadiri pengurus Parindra cabang Singkawang dan cabang Pontianak, terpilih Zaini dan Boerhanoeddin yang akan memimpin Surya Wirawan Singkawang (Paath 1939, 2). Berdirinya Surya Wirawan cabang Singkawang ini menjadi penanda bangkitnya pergerakan kebangsaan di Singkawang, khususnya yang melibatkan golongan pemuda dan pelajar. Hal ini karena pascapenumpasan gerakan Sarekat Rakyat pada 1927, praktis tidak terdapat lagi organisasi kepemudaan yang bersifat nasional hingga akhirnya didirikan Surya Wirawan cabang Singkawang pada awal 1939.

Ranting Parindra berikutnya yang mengembangkan organisasinya menjadi cabang ialah Sambas pada 12 Februari 1939 melalui sebuah rapat umum di Sekolah Tarbiyatul Islamiyah. Pendiran ini mendapat dukungan dari Maharaja Imam Kesultanan Sambas H. M. Basiuni Imran yang hadir pada saat itu sebagai tuan rumah. Cabang Sambas ini diketuai oleh Soerasoeganda dan H. Soelaiman, Fachroeddin dan Oeray Oesman sebagai sekretaris, H. Basioeni sebagai bendahara, dan dibantu H. Moendji dan Moh. Soeod. Parindra cabang Sambas langsung membentuk badan-badan untuk mencapai cita-cita partai yang diketuai oleh sejumlah tokoh penting. Seperti *Spaar-Crediet en Verbruiks-Cooperatie* yang dipimpin H. A. Razak dan H. Soeleman, Penolong Kesengsaraan Oemoem oleh Soerasoeganda sendiri, Badan Kesehatan Rakjat dipimpin Guru Moersjid (guru *Schakelschool* Tarbiyatul Islamiyah), Badan Pergoeraan Rakjat dipimpin Guru M. Zaini Arif, dan Badan Politik dipimpin dr. Syahrial (Paath 1939b, 4).

Dalam perjalanannya, Parindra cabang Sambas dapat dikatakan sebagai cabang yang besar dengan diperkuat sejumlah tokoh terpendang seperti guru, pegawai negeri, tokoh masyarakat, dan kaum intelektual. Hal ini dibuktikan dengan bergabungnya Ir. Sucitro yang pada Agustus 1939 menjadi wakil ketua dan dr. Syahrial yang terdaftar sebagai salah satu komisi (komisaris) di kepengurusan Parindra cabang Sambas (Paath 1939h, 3). Di sekitar *Onderafdeeling* Sambas juga terdapat *kring* Parindra di Distrik Pemangkat dan Kartiasa. Selain memiliki anggota yang

kurang lebih sebanyak 70 orang di awal pendiriannya, Surya Wirawan cabang Sambas diketahui juga menghimpun sekitar 230 pemuda (Paath 1939f, 2).

Tidak begitu lama setelah Sambas, ranting Mempawah juga telah berhasil meningkatkan statusnya menjadi cabang pada 3 April 1939 melalui sebuah rapat yang dihadiri oleh pengurus cabang Pontianak, di antaranya A. N. Hadjarati dan A. Harahap. Rapat itu diselenggarakan di kediaman Daeng Hadji Taha di Kampung Pedalaman dan dihadiri 60 orang yang akan tergabung dalam cabang Mempawah. Dari hasil pemilihan pengurus, terpilihlah Oerai Amir Tsafioeddin dan Ph. M. Talla sebagai ketua dan wakilnya, Abdulaziz Idris dan Gusti Ahmad Djelam sebagai sekretaris, Gusti Abdurrahman yang merupakan “Raden Patih” di Kesultanan Mempawah sebagai bendahara, dan dibantu Mas Abdoel Gani Al-Oefoe, Gusti Pandji Anom, Amierodin, dan Gusti Joenan (Paath 1939c, 4). Sementara itu, pimpinan Surya Wirawan cabang Mempawah dipercayakan kepada Abdullah Sani dan Thaha (Paath 1939c, 2). Di utara Mempawah tepatnya di distrik Sungai Kunyit, diketahui terdapat *kring* Parindra pimpinan Tuan Yusuf (Muazirin A M 2012, 14)

Menyusul cabang Mempawah, pengurus ranting Parindra di Ngabang (Landak) juga berhasil meningkatkan statusnya menjadi cabang pada 28 Mei 1939 yang dipimpin oleh Rani Soelaiman dan Mas Mohammad Ali dengan 46 anggota. Rapat yang diselenggarakan di kediaman Ya’ Oesman Doeri di Kampung Radja itu juga berhasil mendirikan Surya Wirawan cabang Ngabang yang dipimpin oleh Ibrahim Wahid (Paath 1939e, 4). Apabila diperhatikan lebih saksama, pesatnya perkembangan Parindra di kota-kota pesisir barat didukung berkat terkoneksinya Pontianak-Sambas melalui jalan raya yang pembangunannya telah diinisiasi sejak 1920-an. Hal ini berdampak pada kemudahan mobilitas, kegiatan perekonomian, interaksi penduduk, dan pertukaran informasi yang semakin singkat dan terjangkau. Pembangunan Jalan Raya Pontianak-Sambas itu kemudian diperluas menuju ke daerah pedalaman seperti ke Ngabang, yang dibangun dari poros Sungai Pinyuh (Rahmayani & Listiana 2022, 96–102). Begitu pula dengan sarana komunikasi, per tahun 1939 telah terkoneksi saluran telepon dan telegraf secara langsung sepanjang Pontianak-Mempawah-Singkawang-Pemangkat-Sambas (Gouvernements Bedrijf der Telefonie 1939).

Pengembangan organisasi Parindra juga terus dilakukan menuju ke arah hulu (timur) sepanjang kota-kota daerah aliran Sungai Kapuas. Machrus Effendi yang pernah tergabung di Surya Wirawan Sambas dan pada tahun 1940 menjadi pengurus Parindra cabang Pontianak mengemukakan bahwa partai ini juga hadir di daerah Sanggau dan Sintang (Effendi 1982, 38). Diketahui bahwa di Tayan (*Onderafdeeling* Sanggau), Parindra dipimpin oleh Gusti Mahmud dan R. Abdulmanan (Aju 2017, 30), sedangkan di Sintang dipimpin keluarga kesultanan setempat, yakni Gusti Ismail, Gusti Taufik, dan Gusti Mustafa (Soedarto 1989, 98). Hal ini semakin menguatkan kesan bahwa Parindra adalah partai yang bercorak nasional dan terbuka bagi semua latar belakang. Pada awal 1941 *kring* Parindra di hulu Kapuas telah terbentuk di Nanga Bunut yang dipimpin Tahir (Paath 1941a, 3). Pengembangan organisasi juga direncanakan meluas ke wilayah selatan, yang berdasarkan pemberitaan sedang dipersiapkan cabang di Sukadana yang masuk daerah *Afdeeling* Ketapang (Paath 1939e, 4).

Fakta-fakta tersebut di atas menunjukkan bahwa Parindra dapat dikatakan telah hadir di setiap *afdeeling* di Keresidenan Kalimantan Barat, yakni Pontianak, Singkawang, Sintang, dan Ketapang. Sebuah konferensi daerah juga telah berhasil dilaksanakan di Pontianak pada 8–9 April 1939 yang dihadiri utusan Pengurus Besar Parindra dari Surabaya, yakni R. Soedjono.

Dalam konferensi itu, A. N. Hadjarati berhasil ditetapkan sebagai Komisaris Daerah Parindra Kalimantan Barat (Paath 1939e, 3).

Perjuangan Parindra Kalimantan Barat dalam Menghadapi Pemerintah Kolonial

Keberhasilan Parindra di wilayah ini dalam mengembangkan organisasinya dilanjutkan dengan langkah-langkah konkret dalam memperjuangkan kemajuan bagi rakyat. Selayaknya sebuah partai politik, Parindra menggariskan perjuangan politik dalam gerakannya demi memperoleh kesamaan dan kesetaraan hak bagi kaum bumiputera. Namun, Parindra memilih perjuangan secara kooperatif dengan pemerintah kolonial, melalui bergabungnya kader-kadernya dalam parlemen seperti dewan rakyat (*Volksraad*) atau dewan-dewan daerah setempat. Cara ini dipilih karena kuatnya pengawasan oleh pemerintah kolonial terhadap aktivitas politik kaum bumiputera. Oleh sebab itu, jalan parlementer adalah satu-satunya cara yang dapat ditempuh dengan berpura-pura menjaga kedekatan dengan Pemerintah Hindia Belanda (Wahyuni & Mursal 2022, 63).

Selain melalui perjuangan politik (parlementer), Parindra juga menggunakan jalur gerakan di bidang ekonomi dan sosial untuk membawa kemajuan rakyat. Seperti yang telah diungkapkan di bagian sebelumnya, Parindra juga membina sejumlah organisasi sayap seperti koperasi, rukun tani, dan kependuan Surya Wirawan. Hal ini sebagaimana yang termaktub dalam pasal 3 anggaran dasar partai, bahwa selain berusaha agar rakyat Indonesia mendapatkan hak-hak politik seluas-luasnya supaya mendapatkan pemerintahan yang berdasarkan demokrasi dan kebangsaan, juga akan memajukan perekonomian dan perikehidupan sosialnya (Wongsokoesomo 1937a, 4). Dengan begitu, hal yang diperjuangkan oleh Parindra tergolong dalam tiga bidang secara umum, yakni politik, ekonomi, dan sosial.

Parindra memandang penting pembangunan peri kehidupan rakyat melalui sejumlah gerakan-gerakan ekonomi seperti pendirian koperasi. Menurut Soedomo (HB Parindra), masyarakat Indonesia yang sejak dahulu berasaskan kolektivisme seperti gotong royong dinilai cocok untuk memperbaiki perekonomian melalui jalan koperasi yang juga berdasarkan asas kerja sama mencapai kemajuan (Soedomo 1936, 18). Sementara itu, dr. Soetomo menjelaskan bahwa Parindra harus menjadi penuntun petani dalam berbagai bentuk usaha koperasi, agar melalui usaha-usaha partai yang dirasa menguntungkan bagi rakyat kecil itu, mereka dapat terangkat penghidupannya dan berguna bagi cita-cita “Indonesia Mulia” (Herlina 2017, 141–142).

Program PB Parindra inilah yang kemudian diikuti oleh pengurus-pengurus cabang Parindra untuk mendirikan koperasi. Cabang Pontianak misalnya, pada November 1938 mulai melakukan penghimpunan modal di antara anggota-anggotanya untuk mengembangkan usaha dan kemanfaatan bagi masyarakat (Paath 1938c, 3). Sementara di Singkawang, pengurusnya berhasil menjadikan Spaar en Crediet Cooperatie Indonesia di kota itu (telah beranggotakan 20 orang), masuk dalam badan ekonomi partai (Paath 1939b, 3). Keberadaan koperasi ini selain dapat membantu usaha ekonomi anggota partai, juga bermanfaat bagi masyarakat yang tergabung dalam Rukun Tani.

Dalam bidang sosial, kepedulian pengurus Parindra di daerah ini terhadap kesulitan rakyat dibuktikan dengan mengumpulkan dan menyalurkan zakat. Misalnya, yang dilakukan cabang Pontianak dengan membentuk komisi zakat fitrah pada Desember 1938 (Paath 1938d, 2). Persoalan pendidikan juga tidak terlepas dari perhatian partai yang dimulai dari pembenahan yang cukup mendasar, yakni peningkatan literasi rakyat untuk memberantas angka buta huruf. Hal ini dipandang sebagai solusi atas tidak terjangkaunya pendidikan bagi rakyat. Berangkat

dari pemikiran dr. Soetomo, bahwa golongan bumiputera terdidik yang besar jumlahnya di Parindra, berkewajiban menjadi penuntun masyarakat untuk mencapai kemajuan (Tangkilisan 2015, 14).

Cabang Singkawang misalnya, pada Maret 1939 membuka sekolah baca tulis gratis ABC Cursus yang ditujukan untuk semua kalangan (Roekoen 1939, 3). Bagi Parindra, memajukan rakyat melalui pendidikan merupakan sebuah langkah penting untuk menciptakan perubahan sosial dan menciptakan pembaharuan yang bermuara pada peningkatan kesejahteraan. Kemampuan menulis, literasi, dan numerikal yang cukup dapat menjadi modal bagi rakyat untuk lebih mengembangkan diri, misalnya dalam berekonomi dan bertani. Di cabang Ngabang, kembalinya tokoh aktivis eks-Digulis seperti R. Mahmud Susilo Suwignjo turut mendorong cabang ini mendirikan lima sekolah rakyat, koperasi, dengan Surya Wirawan yang juga memiliki klub kesenian dan olahraga (Suwignjo & Mansur 1972, 299).

Sumbangsih Parindra dalam bidang ekonomi dan sosial tampaknya menginspirasi berdirinya perkumpulan atau sebuah usaha lokal yang bergerak di bidang serupa. Misalnya di Sambas, pada Maret 1939 dilaporkan telah berdiri dua koperasi di sekitar kota itu, yakni di Pasar Melayu dan Kampung Tanjung Belanda (Paath 1939d, 2). Sementara di Ngabang pada Juni 1939, perkumpulan Kasatrija didirikan dengan maksud untuk mengentaskan buta huruf dengan pemberian pengajaran tulis-menulis (Paath 1939m, 4). Dalam hal bidang sosial lain seperti kesehatan, dr. Rubini yang merupakan kader Parindra mendukung pendirian Komite Pemberantasan TBC pada September 1939. Komite ini menggalang dana amal untuk membantu pengentasan penyakit tuberkulosis yang banyak diderita rakyat kecil ketika itu (Paath 1939o).

Perkembangan pesat Parindra yang mampu menarik anggota serta simpatisan dari segala kalangan dipandang mengkhawatirkan oleh pemerintah kolonial. Maka untuk melemahkan Parindra, Belanda mendukung berdirinya organisasi Persatuan Anak Borneo (PAB) pada 28 Mei 1939. Organisasi ini diketuai R. Muslimun Nalaprana, seorang pegawai negeri yang menjabat sebagai demang di Pontianak. Bagi Belanda, PAB sedianya didirikan untuk memisahkan kaum intelektual dari kalangan elite tradisional dan bangsawan dari aktivitas pergerakan nasional (Nurchayani 2019, 68). Parindra yang berdasar nasionalisme dan bersifat terbuka bagi semua kalangan merupakan antitesis keinginan pemerintah kolonial agar melalui PAB ide-ide gerakan nasional dapat dibendung terhadap kalangan bangsawan (Suwignjo & Mansur 1972, 160).

Belanda tampak ingin mengadu dua organisasi ini dengan mengembuskan isu kedaerahan, yakni predikat organisasi bukan bentukan putra Kalimantan (Parindra) dengan bentukan putra Kalimantan (PAB). Alhasil dapat dikatakan bahwa sebagian besar pengurus PAB terdiri atas kalangan keluarga kesultanan dan pegawai pemerintah (Listiana 2019, 91). Hal lain juga tampak pada anggaran dasar PAB yang menyebutkan bahwa hanya masyarakat Borneo sejati atau yang telah menganggap dirinya anak Borneo yang dapat diterima menjadi anggota (Paath 1939h, 4), dan menolak keanggotaan ganda dengan organisasi politik seperti Parindra (Paath 1939i, 3).

Namun, skenario untuk membenturkan dua organisasi tersebut gagal karena ketua PAB menyadari siasat Belanda dan kemudian mengajak aktivis eks-Digulis untuk bergabung, di antaranya pengurus Parindra. Ajakan ini disikapi positif oleh Parindra yang menginginkan kerja sama dengan berbagai kekuatan, termasuk dengan PAB. Selain itu, masuknya aktivis-

aktivis pergerakan ini dapat diarahkan untuk membelokkan haluan PAB dari yang awalnya untuk menyaingi Parindra menjadi gerakan sosial-kebudayaan. Dua di antara aktivis yang kemudian “disusupkan” ke PAB, yakni (1) H. Rais (pengurus Parindra cabang Pontianak) dipercaya oleh PAB mengurus majalah *Kesedaran*, dan (2) Gusti Sulung Lelanang yang juga bangsawan Kesultanan Landak mengurus Badan Kebudayaan PAB. Hasil kerja sama keduanya berhasil menjadikan R. Muslimun Nalaprana sebagai anggota *Volksraad* (Nurchayani 2019, 68–69).

Parindra di wilayah ini juga turut mendukung tuntutan “Indonesia Berparlemen” yang saat itu tengah diperjuangkan oleh aktivis-aktivisnya dalam Gabungan Politik Indonesia (GAPI). GAPI menginginkan agar Indonesia diberi kesempatan memiliki parlemen sendiri yang dipilih langsung. GAPI didirikan oleh gabungan partai politik, yakni Parindra, Gerindo, PII, Paguyuban Pasundan, PSII, dan sebagainya, dengan menjadi wadah kekuatan-kekuatan nasional yang lebih berani bergerak bersama-sama. GAPI yang didirikan pada 21 Mei 1939 itu diketuai Muhammad Husni Thamrin yang merupakan anggota *Volksraad* mewakili Parindra (Yolanda & Hartati 2022, 11).

Bentuk dukungan cabang-cabang Parindra terhadap tuntutan “Indonesia Berparlemen” ialah dengan mengadakan rapat umum. Misalnya yang dilakukan oleh cabang Pontianak pada 17 Desember 1939 di gedung Excellent Hall, bersama sejumlah partai lain seperti Partai Islam Indonesia (PII) dan Partai Arab Indonesia (PAI) (Paath 1939n, 3). Dua partai yang berbasis umat Islam itu juga mendukung cita-cita dan akhirnya bergabung dalam GAPI (Siri 2022, 265). Besarnya rakyat yang datang ke rapat umum membuktikan tingginya dukungan terhadap cita-cita politik Parindra. Hal ini seperti yang diadakan cabang Mempawah pada 17 Desember 1939, juga dihadiri oleh Panembahan Mempawah Gusti Muhammad Thaufiq Accamuddin (Paath 1939o, 2).

Sementara itu di Sambas, rapat umum ini berbuah insiden diturunkannya Machrus Effendi (Sekretaris Parindra Sambas) dari mimbar pidato oleh aparat. Pasalnya, pidato Machrus Effendi dianggap oleh mantri polisi yang mengawasi terlalu konfrontatif terhadap pemerintah kolonial. Akibatnya, ia dipanggil oleh *Controleur* Sambas untuk diperingatkan. Usaha-usaha cabang Sambas untuk terus menyuarakan tuntutan parlemen bagi Indonesia terus dilakukan hingga Januari 1940, dalam sebuah rapat umum Surya Wirawan dengan dihadiri oleh 500 pemudanya di Pasar Melayu (Effendi 1982, 44). Kali ini Machrus Effendi yang juga Wakil Ketua Surya Wirawan Sambas harus diseret ke pengadilan dengan tuduhan mengorganisasi rapat umum ilegal, dan mendapatkan vonis denda f-25, atau kurungan selama sebulan (Paath 1940, 2).

Perjuangan dan gerakan Parindra pada pertengahan 1940 mendapat pengaruh dari kondisi internasional, yang ketika itu tengah berkecamuk Perang Dunia II dan Kerajaan Belanda diserang Jerman pada 10 Mei 1940. Hal ini menempatkan Hindia Belanda ditetapkan statusnya menjadi “*Staat van Beleg*” atau keadaan bahaya perang. Kondisi ini memengaruhi pergerakan Parindra yang juga telah diwanti-wanti oleh pemerintah kolonial. HB Parindra kemudian mengumumkan kepada seluruh cabangnya untuk lebih memerhatikan aturan berkumpul yang dikeluarkan oleh panglima tentara. Misalnya, terkait larangan mengadakan rapat-rapat umum terbuka dan rapat-rapat tertutup yang harus mendapatkan izin dari pemerintah kolonial serta dilarang membicarakan persoalan politik (Paath 1940b, 3).

Keadaan bahaya perang seperti tersebut di atas jelas memengaruhi Parindra sebagai sebuah partai yang berbasis massa dan kerap mengadakan pertemuan terbuka serta pembicaraan

politik. Melalui kongres ketiga yang diadakan di Surabaya (29–30 Juni 1941), Parindra melawan (menolak) rencana pemerintah kolonial dalam pengerahan rakyat menjadi milisi untuk membantu Belanda dalam urusan pertahanan/peperangan. Bagi Parindra, kewajiban untuk membela tanah airnya harus berdasarkan kepentingan dan kemauan rakyat Indonesia sendiri, yang diputuskan melalui parlemen yang tempo waktu dituntut oleh GAPI (Hoofdbestuur Parindra 1941).

Sementara itu, kondisi cabang-cabang Parindra khususnya di luar Jawa mulai merasakan kemunduran, misalnya yang terjadi pada cabang Pontianak pada Juli 1941. Sejak diterapkannya status “*Staat van Beleg*,” Parindra cabang Pontianak kesulitan mengadakan kursus kepartaian yang kerap dilaksanakan setiap Rabu, ditambah semakin berkurangnya pembayaran kontribusi oleh anggota. Akibatnya, pengurus cabang melakukan pencoretan terhadap anggota-anggota yang lama menunggak, dari awalnya beranggotakan sekitar 1500 menjadi 900 (Paath 1941, 2).

Praktis gerakan-gerakan Parindra periode ini untuk sementara hanya menitikberatkan pada bidang sosial-ekonomi dan rapat-rapat tertutup untuk kalangan sendiri. Eksistensi Parindra di Kalimantan Barat pada akhirnya mesti dihentikan karena masuknya tentara Jepang. Pada akhir 29 Januari 1942 balatentara Jepang berhasil merebut Pontianak sebagai ibukota keresidenan yang kemudian segera membentuk pemerintahan militer. Agar lebih mudah mengontrol rakyat, Jepang memutuskan untuk membekukan semua organisasi yang ada pada 1 April 1942 (Gin 2011, 105), disusul keluarnya larangan untuk berserikat dan berkumpul (Yafi & Darmadi 2023, 128). Melihat kondisi yang semakin tidak menguntungkan yang akan berdampak pada keselamatan aktivis dan kelanjutan perjuangan di masa depan, pada 9 September 1942 Rani Soeleiman sebagai komisaris daerah menyatakan pembubaran Parindra di wilayah Kalimantan Barat (Dai Nippon Kaigun Minsei-Bu Pontianak 1942, 2).

SIMPULAN

Kehadiran Parindra di Kalimantan Barat berawal dari sebuah ranting yang didirikan pada 1937 oleh aktivis Parindra dari Pulau Jawa yang bertugas di Pontianak. Pada 22 Juli 1938 ranting Parindra di Pontianak resmi menjadi ranting diketuai A. N. Hadjarati. Hal ini disusul berbagai kota lain di Kalimantan Barat sepanjang 1938–1939, antara lain Singkawang, Sambas, Mempawah, Ngabang, Tayan, Sintang, Nanga Bunut, dan Sukadana. Parindra mendapatkan sambutan baik dari berbagai kalangan karena berasaskan nasionalisme Indonesia dan terbuka, serta bersikap kooperatif dengan berbagai elemen termasuk dengan pemerintah kolonial. Perkembangan pesat Parindra di kota-kota tersebut berkat terkoneksinya transportasi: Jalan Raya Pontianak-Sambas, jalan poros Pontianak-Ngabang, dan transportasi sungai yang menghubungkan kota-kota sepanjang aliran Sungai Kapuas.

Gerakan dan perjuangan Parindra dalam menghadapi kolonialisme digariskan dengan perjuangan politik kooperatif yang bersifat kerja sama maupun parlementer. Dukungan terhadap tuntutan “Indonesia Berparlemen” yang disuarakan GAPI, ditindaklanjuti cabang-cabang dengan mengadakan rapat-rapat umum. Perjuangan Parindra di wilayah ini mengalami kemunduran pada pertengahan 1940 karena pengetatan aktivitas politik akibat Perang Dunia II. Parindra di seluruh Kalimantan Barat akhirnya dibekukan pada September 1942 berdasarkan aturan organisasi yang dikeluarkan oleh Pemerintah Militer Jepang.

Berdasarkan paparan di atas, terlihat bahwa keberadaan Parindra telah menjadi kekuatan politik yang besar dalam arus pergerakan kebangsaan, khususnya di Kalimantan Barat. Memiliki banyak cabang dan anggota dari berbagai kalangan serta simpatisan, mampu

memberikan kontribusi dalam peri-kehidupan rakyat khususnya di bidang sosial dan ekonomi. Parindra di Kalimantan Barat mampu mendorong tumbuhnya kesadaran politik rakyat melalui kursus-kursus kader dan gerakan kepanduan, maupun melalui rapat-rapat umum. Paparan ini mampu mengisi celah perjalanan sejarah perjuangan bangsa di era pergerakan nasional, khususnya terkait gambaran yang terjadi di daerah (luar Jawa). Meskipun demikian, terbuka peluang untuk memperdalam kajian terkait Parindra di Kalimantan Barat, misalnya pada gerakan sosial-ekonominya atau aktivitas cabang-cabang yang ada.

UCAPAN TERIMA KASIH

T/A

DAFTAR PUSTAKA

- Abbas, I. (2014). Memahami Metodologi Sejarah Antara Teori dan Praktek. *Jurnal Etnohistori*, 1(1), 23-41. <https://doi.org/https://doi.org/10.33387/jeh.v1i1.805>
- Achmad, Y., Rachman, A., Soedarto, & Adhisidharto, W. (1981). *Sejarah Perlawanan Terhadap Imperialisme dan Kolonialisme di Kalimantan Barat*. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
- Aju. (2017). *Kalimantan Barat: Lintasan Sejarah dan Pembangunan dari Era Kolonial Belanda-Tahun 2013*. Derwati Press.
- Dai Nippon Kaigun Minsei-Bu Pontianak. (1942, September 16). Pemboebaran Parindra di Kalimantan Barat. *Borneo Barat Shinbun*.
- De Keizer, W. G. . (1927, April 6). De Geinterneerden. *De Locomotief*.
- Dikawati, R., & Sudrajat, A. (2017). Golongan Tua Menggagas Pergerakan Nasional: Pemikiran R.M.T Koesoemo Oetoyo di Bidang Politik Tahun 1908-1942. *Agastya: Jurnal Sejarah Dan Pembelajarannya*, 7(2), 20. <https://doi.org/10.25273/ajsp.v7i2.1487>
- Effendy, M. (1982). *Sejarah Perjuangan Kalimantan Barat*. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Pontianak.
- Gin, O. K. (2011). *The Japanese Occupation of Borneo, 1941-1945*. Routledge.
- Gouvernements Bedrijf der Telefonie. (1939). *Gids voor het Telefooncomplex Pontianak (West-Borneo)* (Issue 47, p. 24). Gouvernements Bedrijf der Telefonie Nederlands Indie.
- Herlina, N. (2017). Tiga Serangkai Dalam Pergerakan Nasional. In D. Marihandono (Ed.), *Ki Hajar Dewantara "Pemikiran dan Perjuangannya"* (p. 119). Museum Kebangkitan Nasional, Kementerian Pendidikan Kebudayaan RI.
- Hoofdbestuur Parindra. (1941, July 8). Parindra Menolak Militie: Poetoesan Kongres Parindra Jang Ke III Bertempat di-Soerabaja, Ahad Malam, 29-30 Juni 1941. *Borneo-Barat*.
- Kanumuyoso, B. (2020). *Metode Sejarah*. Direktorat PTLK, Dirjen Kebudayaan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- Kasenda, P., Tangkilisan, Y., & Marihandono, D. (2013). *Biografi Dokter Soetomo*. Museum

Kebangkitan Nasional, Kementerian Pendidikan Kebudayaan RI.

Kuntowijoyo. (2003). *Metodologi Sejarah* (2nd ed.). Tiara Wacana.

Listiana, D. (2019). Indonesia dalam Penciptaan Nasionalisme Borneo: Rasa Kebangsaan Persatoean Anak Borneo dalam Majalah Kesedaran dan Doenia Pemoeda di Kalimantan Barat Tahun 1940. In *Wacana Nasionalisme dalam Pers Kalimantan Barat pada Masa Pergerakan Kebangsaan*. CV. Media Jaya Abadi.

Listiana, D., Juniardi, K., & Pratama, R. (2014). *Pers dan Pemikiran Intelektual di Borneo Barat Masa Kolonial*. Kepel Press.

Muazirin A M, A. (2012). *Sejarah Muhammadiyah Kampung Sungai Kunyit*. Tidak Diterbitkan.

Nurchahyani, L. (2019). Pemikiran Haji Rais bin Abdoerrachman dan Masa Pergerakan Nasional di Kalimantan Barat (1900–1942). In *Wacana Nasionalisme dalam Pers Kalimantan Barat pada Masa Pergerakan Kebangsaan*. CV. Media Jaya Abadi.

Paath, R. . (1938a, July 6). Pendirian Tjabang Parindra. *Borneo-Barat*, 4.

Paath, R. . (1938b, August 23). Pengeroes Parindra Tjabang Pontianak Memperkenalkan Diri Dengan H.P.B. *Borneo-Barat*.

Paath, R. . (1938c, November 15). Kapitaal Vorming Diantara Anggota-Anggota Parindra. *Borneo-Barat*.

Paath, R. . (1938d, December 10). Verslag Commisie Zakat Fitrah Parindra Tjabang Pontianak. *Borneo-Barat*.

Paath, R. . (1938e, December 15). Pelantikan Surya Wirawan Parindra Tjabang Pontianak. *Borneo-Barat*.

Paath, R. . (1938f, December 22). Kring Menjadi Tjabang (Parindra di Singkawang). *Borneo-Barat*.

Paath, R. . (1938g, December 29). Singkawang (Parindra). *Borneo-Barat*.

Paath, R. . (1939a, January 17). Surya Wirawan Tjabang Singkawang. *Borneo-Barat*.

Paath, R. . (1939b, February 6). Pendirian Dipengaroehi Omong. *Borneo-Barat*.

Paath, R. . (1939c, March 4). Rapat Anggota Jang Pertama Parindra Tjabang Sambas. *Borneo-Barat*.

Paath, R. . (1939d, March 30). Sambas Semakin Bangoen. *Borneo-Barat*.

Paath, R. . (1939e, April 5). Surya Wirawan, Perubahan Bestuur (Mempawah). *Borneo-Barat*.

Paath, R. . (1939f, April 8). Tjabang Parindra Mempawah Berdiri. *Borneo-Barat*.

Paath, R. . (1939g, April 15). Conferentie Partai Indonesia Raja di Pontianak. *Borneo-Barat*.

- Paath, R. . (1939h, May 9). Perajaan Mauloed Jang Bersemangat di Sambas. *Borneo-Barat*.
- Paath, R. . (1939i, June 6). P.A.B dan Politiek. *Borneo-Barat*, 4.
- Paath, R. . (1939j, June 8). Keterangan Dari Pihak PAB. *Borneo-Barat*, 4.
- Paath, R. . (1939k, June 8). Pelantikan Kring Parindra di Ngabang, Menjadi Tjabang. *Borneo-Barat*, 4.
- Paath, R. . (1939l, June 8). Pelantikan Kring Parindra di Ngabang Menjadi Cabang. *Borneo-Barat*.
- Paath, R. . (1939m, June 17). Ngabang: Administratiekantoor “Kasatrija.” *Borneo-Barat*.
- Paath, R. . (1939n, August 26). Soesonan Bestuur Parindra Tjabang Sambas. *Borneo-Barat*.
- Paath, R. . (1939o, September 28). Gerakan Amal Dari Pihak Indonesiers. *Borneo-Barat*.
- Paath, R. . (1939p, December 19). Pemandangan Dalam Perhimpoean Comite Menoentoet Indonesia Diberikan Parlement. *Borneo-Barat*.
- Paath, R. . (1939q, December 23). Borneo Barat: Mempawah, Pemandangan Dalam Rapat Oemoem. *Borneo-Barat*.
- Paath, R. . (1940a, February 15). Sambas: Katoea Moeda S.W. Didjatoehi Hoekoeman. *Borneo-Barat*.
- Paath, R. . (1940b, May 21). Ma’loemat Parindra: Perobahan Loear Biasa. *Borneo-Barat*.
- Paath, R. . (1941a, May 8). Dari Kalangan Parindra (di Nanga Boenoet). *Borneo-Barat*.
- Paath, R. . (1941b, July 22). Parindra Kembali Madjoe? *Borneo-Barat*.
- Padiatra, A. M. (2020). *Ilmu Sejarah: Metode dan Praktik*. JSI Press.
- Perdana, Y., & Pratama, R. A. (2022). *Sejarah Pergerakan Nasional Indonesia* (N. A. Meliana (ed.)). Penerbit Lakeisha.
- Rahmayani, A., & Listiana, D. (2022). Antara “Ide Kemajuan” Kolonial Dan Realitas Lingkungan: Jalan Raya Dalam Pembangunan Prasarana Perhubungan Di Pesisir Barat Kalimantan. *Handep: Jurnal Sejarah Dan Budaya*, 6(1), 85–106.
<https://doi.org/10.33652/handep.v6i1.205>
- Roekoen. (1939, March 25). Mimbar Oemoem: Sekolahkanlah Anak-anak Kita, dan Berantastlah Boeta Hoeroef. *Borneo-Barat*.
- Samidi. (2023). Gotong Royong Bersama Dokter Soetomo Membangun Gedung Nasional Indonesia dan Kesadaran Kebangsaan 1924-1938. *Mozaik Humaniora*, 23(2), 206–222.
<https://doi.org/10.20473/mozaik.v23i2.41989>
- Santosa, A. B., & Supriatna, E. (2008). *Buku Ajar Sejarah Pergerakan Nasional (Dari Budi Utomo*

- 1908 Hingga Proklamasi Kemerdekaan 1945). Jurusan Pendidikan Sejarah Universitas Pendidikan Indonesia.
- Siri, H. (2022). Sejarah Pergerakan Nasional Indonesia. In *Lakeisha*.
- Soedarto. (1989). *Naskah Sejarah Perjuangan Rakyat Kalimantan Barat 1908-1950*. Pemerintah Daerah Tk.II Kalimantan Barat.
- Soedarto, Adhisidharto, W., & Sugeng. (1978). *Sejarah Kebangkitan Nasional Daerah Kalimantan Barat*. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
- Soedomo. (1936, March). Pereconomian (Pidato Tn. Soedomo lid Centraal Bestuur dalam Openbar Vergadering Parindra). *Soeara Parindra*, 16-19.
- Suryadi. (2016). *Konferensi Parindra dan SW di Pontianak, Majalah Penjedar No. 21, Tahun II, 21 Mei 1939*. <https://niadilova.wordpress.com/2016/01/03/klasik-nusantara-6-konferensi-parindra-di-pontianak-1939/>
- Suwignjo, R. M. S., & Mansur, A. (1972). *Sebelas Perintis Kemerdekaan Indonesia Dari Kalimantan Barat*. Tanpa Penerbit.
- Tangkilisan, Y. B. (2015). Indonesia Mulia: Visi Dokter Soetomo Tentang Kesejahteraan Rakyat, Moral Ekonomi, dan Modal Sosial. *Sipatahoenan: South-East Asian Journal for Youth, Sports & Health Education*, 1(1), 9-22.
<https://doi.org/https://doi.org/10.2121/sip.v1i1.41.g39>
- Tim Muskitnas. (2011). *Soetomo dan Perjuangannya*. Museum Kebangkitan Nasional.
- Wahyuni, B., & Mursal, I. F. (2022). Analisis Masa Pergerakan Nasional Indonesia 1908-1942. *Siginjai: Jurnal Sejarah*, 2(1), 54-66.
<https://doi.org/https://doi.org/10.22437/js.v2i1.18742>
- Wajidi, W. (2015). Eksistensi Partai Indonesia Raya (Parindra) Di Kalimantan Selatan, 1935-1942. *Patanjala : Jurnal Penelitian Sejarah Dan Budaya*, 7(1), 17.
<https://doi.org/10.30959/patanjala.v7i1.80>
- Wongsokoesomo, R. (1936a, January). Tjabang Parindra Baroe. *Soeara Parindra*.
- Wongsokoesomo, R. (1936b, June). Samboengan Berita Tjabang: Tjabang Tjilatjap. *Soeara Parindra*, 22.
- Wongsokoesomo, R. (1937a, February). Keterangan Azas Dari Partai Indonesia Raja. *Soeara Parindra*.
- Wongsokoesomo, R. (1937b, March). Alamat Partai C.B Parindra dan Tjabang-Tjabang. *Soeara Parindra*, 20.
- Yafi, R. A., & Darmadi, Y. (2023). Pendudukan Jepang di Pontianak, 1941-1943. *Warisan: Journal Oh History and Cultural Heritage*, 4(3), 124-131.
<https://doi.org/https://doi.org/10.34007/warisan.v4i3.1991>

Yolanda, M., & Hartati, U. (2022). Perkembangan Gabungan Politik Indonesia (GAPI) Pada Masa Pergerakan Nasional Indonesia 1939-1942. *Swarnadwipa*, 5(1), 10.
<https://doi.org/10.24127/sd.v5i1.1991>